

DAFAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Asikin zainal, dan Amirudin, *Penggantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, *Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat*, Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bina Ilmu Pustaka, 2007).
- Azed Abdul Bari dan Makmur amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI,
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Booklet KPU RI tahun 2014, Jakarta
- Fatmawati, *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara, 1st ed.*, (Jakarta: Penerbit UI-Press, 2010).
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, kompas, 2009.
- Friedrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*.
- Gaffar , Janedjri M., *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, 2013.
- Gianfranco Baldini and Adriano Pappalardo, *Elections, Electoral Systems and Volatile Voters*, New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Yogyakarta : Pustaka Belajar*. 2004.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005.

Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru.

Manan, Munafrizal. *Democraton Constitutionlism (New Constitutionalism For The Emerging of New Democracy: the case of Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2013).

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, 3rd ed.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

Rahman Arfin, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya : Penerbit SIC, 2002.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.